

BAB V

KESIMPULAN

Pada skripsi ini, penulis berusaha menjelaskan tentang kepentingan politik dibalik dukungan Arab Saudi terhadap kelompok oposisi dalam konflik Suriah. Konflik Suriah terjadi sejak tahun 2011, antara pemerintah Suriah, Bashar Al-Assad dengan rakyatnya sendiri, dimana pada saat itu terjadi demonstrasi terkait 15 anak yang ditahan oleh pemerintah Suriah akibat membuat tulisan di dinding sekolah mereka yang bertuliskan "Rakyat Menginginkan Rezim Turun".

Demonstrasi kian meluas disusul dengan tuntutan-tuntutan masyarakat yang semakin beragam, diantaranya tentang pembebasan tahanan politik yang dikrimanilisasi, korupsi, serta kebebasan dalam segi ekonomi sosial dan politik. Namun pemerintah menilai demonstrasi tersebut sebagai ancaman dan menanggapi dengan tindakan represif yaitu menerjunkan tentara dan melepaskan tembakan kepada rakyat sipil untuk membubarkan demonstrasi yang terjadi.

Demonstrasi yang mulanya berlangsung damai, meningkat menjadi konflik bersenjata antara kelompok oposisi melawan pasukan pemerintah Bashar Al-Assad. Masyarakat yang geram dengan tindakan pemerintah menuntut agar presiden Bashar Al-Assad untuk turun dari jabatannya. Akibat konflik tersebut, pada tahun 2016 korban dilaporkan mencapai 470.000 jiwa dan sekitar 55.000 diantaranya adalah anak-anak.

Konflik Suriah menarik perhatian dunia internasional karena dianggap sebagai pelanggaran HAM berat. Selain itu, letak geografi Suriah yang strategis menyebabkan negara-negara tetangganya memperkuat pertahanannya demi mengantisipasi meluasnya konflik Suriah yang akan berpengaruh terhadap stabilitas. Menanggapi hal tersebut, Arab Saudi sebagai salah satu negara yang memiliki pengaruh besar di kawasan Timur Tengah memutuskan untuk terjun

dalam konflik tersebut sebagai upaya untuk memberikan solusi perdamaian di negara Suriah.

Dukungan Arab Saudi ditunjukkan dengan menjadi salah satu penyedia utama persenjataan kelompok oposisi *Free Syrian Army* (FSA), Arab Saudi juga memberikan bantuan finansial dan kemanusiaan bagi para pengungsi Suriah. Dalam dukungan internasional, Arab Saudi berhasil memaksimalkan kepentingannya melalui organisasi Liga Arab yaitu mengeluarkan keanggotaan Suriah serta mengizinkan negara-negara anggotanya untuk memberikan bantuan persenjataan terhadap kelompok oposisi sebagai bentuk resolusi perdamaian bagi Suriah yaitu dengan melengserkan Bashar Al-Assad. Melalui forum internasional PBB, Arab Saudi kerap mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat terkait sanksi terhadap Suriah. Namun upaya Arab Saudi mengajak negara-negara melakukan campur tangan terhadap Suriah dianggap gagal karena adanya veto dari Rusia dan China yang selalu menolak resolusi yang ditawarkan tersebut, karena dianggap akan memperkeruh suasana. Hal ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah Rusia dan China terhadap pemerintah Bashar Al-Assad.

Di sisi Arab Saudi, Amerika Serikat selalu menyerukan perlawanan terhadap pemerintah Bashar Al-Assad. Tidak terlepas dari fakta bahwa kedua negara merupakan sekutu sejak lama. Selain memiliki kewajiban untuk melindungi dan membantu Arab Saudi sebagai negara representatif di kawasan, Amerika Serikat juga kepentingan mengamankan stabilitas ekonomi dengan negara-negara produsen yang berkaitan dengan impor minyak mentah. Amerika Serikat juga memastikan agar tuntutan adanya demokrasi di Suriah berhasil, yang berimbas menguatnya ideologi yang dibawa pemerintah Amerika Serikat di Timur Tengah. Terlepas dari kepentingan Amerika Serikat, Arab Saudi membutuhkan perlindungan sebagai negara adidaya untuk melancarkan segala kepentingan Arab Saudi dalam menjaga eksistensinya di Timur Tengah.

Dukungan pemerintah Arab Saudi terhadap kelompok oposisi bukan tanpa sebab. Dalam perkembangannya, pemerintah Bashar Al-Assad merupakan sekutu Syiah Iran. Terjadinya Revolusi Islam yang dibawa oleh Iran pada tahun 1988, telah membawa pengaruh Syiah menjadi saingan terberat Sunni yang dibawa oleh Arab Saudi. Pada saat konflik Suriah terjadi, Iran juga mengirimkan bantuan-bantuan termasuk tentara IRGC dan pasukan Quds untuk bertarung di sisi Bashar Al-Assad. Melalui pertimbangan tersebut, Arab Saudi memutuskan mengambil langkah dengan menjatuhkan rezim Bashar Al-Assad sebagai upaya melemahkan negara aliansi Iran.

Dalam kasus Suriah, Arab Saudi dan Iran memiliki konflik tersendiri melalui dukungannya terhadap kubu masing-masing, sehingga menjadikan Suriah sebagai ajang perang proksi. Iran merupakan rival bagi Arab Saudi dan memiliki sejarah permusuhan yang panjang. Kedua negara merupakan negara Islam dengan aliran nasional yang berbeda. Arab Saudi sebagai negara Sunni dan Iran sebagai negara Syiah. Kedua negara berjuang untuk mendominasi pengaruh dan kekuasaan di Timur Tengah. Alih-alih menciptakan perdamaian di Timur Tengah, kedua negara dinilai semakin memperburuk situasi dengan memanfaatkan isu kediktatoran, kekerasan militer dan ekstrimis religius (terorisme) di Suriah sebagai pembenaran atas tindakan yang mereka lakukan.

Adanya fakta bahwa Iran selalu hadir dalam setiap konflik yang terjadi pada saat *Arab Spring*, menjadikan pemerintah Arab Saudi merasa terancam akan bangkitnya "Bulan Sabit Syiah" yang dibawa oleh Iran akan menggantikan posisi dan legitimasi Arab Saudi sebagai negara Sunni yang berpengaruh di kawasan Timur Tengah. Dukungan pemerintah Arab Saudi terhadap kelompok oposisi dalam konflik Suriah tidak lain adalah untuk mempertahankan eksistensi berupa kekuasaan dan pengaruh baik dari segi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan keamanan. Hal tersebut mengharuskan Arab Saudi untuk melengserkan Bashar Al-Assad untuk

menempatkan Suriah dibawah kekuasaan Arab Saudi serta mengurangi dominasi pengaruh Iran sebagai rival utama Arab Saudi dalam kawasan Timur Tengah.

Meskipun demikian, tindakan pemerintah Arab Saudi dianggap menghambat proses perdamaian yang dilakukan oleh dunia internasional karena telah menciptakan peperangan baru dengan Iran mengakibatkan konflik Suriah sebagai arena perang proksi menjadi konflik tidak kunjung usai.